



ASAL PINDAH KELAS 3 DAN LUNASI TUNGGAKAN

JKN Mandiri Ditanggung Pemkot Yogya

UMBULHARJO (MERAPI) - Iur atau premi kelas 3 dari peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Yogyakarta bisa ditanggung APBD setempat. Asalkan harus bersedia dilayani di kelas 3. Tapi untuk tunggakan iur kelas 3 sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing peserta BPJS Kesehatan.

"Kebijakan kami kalau peserta itu mau diintegrasikan dibayari pemerintah asalkan di kelas 3 akan dibiayai. Tapi tunggakan itu menjadi tanggungan mereka masing-masing, karena dulu mereka inisiatif ikutnya mandiri," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Fita Yulia, Minggu (16/9).

Seperti diketahui Pemkot Yogyakarta dan komisi terkait di DPRD setempat telah menyepakati iur premi kelas 3 di-

aya APBD untuk mendukung integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan BPJS Kesehatan pada 2019. Sebagian peserta kelas 3 BPJS Kesehatan dari peserta mandiri ada yang menung-gak pembayaran iur.

Dia menyampaikan cakupan jaminan kesehatan nasional di Yogya sudah masuk *universal health coverage*. Tapi banyak peserta yang sudah daftar tapi ma-cet bayar iurnya. Dia menyebut tung-

gakan pembayaran iur BPJS Kesehatan peserta kelas 1 sampai 3 di Kota Yogyakarta lebih dari Rp 10 miliar. Pada 2019 nanti semua jaminan kesehatan pemerintah harus terintegrasi JKN BPJS Kesehatan, sehingga sudah tidak ada lagi Jamkesda.

"Jadi masyarakat harus sudah memutuskan apakah mau dibayari kelas tiga atau tetap mandiri. Tapi kalau mau dibayari kelas tiga, jangan sampai saat o-name maunya naik di kelas dua pelayanannya, maka gugur jaminannya," paparnya.

Fita menyampaikan nantinya peserta kelas 3 BPJS Kesehatan dari peserta mandiri yang menghendaki iur ditanggung pemkot, akan diintegrasikan masuk Penerima Bantuan Iur (PBI) Daerah.

Sejak tahun lalu keluarga miskin di Yogyakarta peserta Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) dimasukkan dalam PBI daerah secara bertahap. Terutama keluarga miskin yang tidak menerima PBI jaminan kesehatan dari pemerintah pusat.

"Soal tunggakan peserta mandiri ya itu terserah kebijakan dari pusat. Apakah itu mau diputihkan atau apa," imbuh Fita.

Menurutnya alokasi anggaran untuk PBI daerah hampir sama dengan anggaran Jamkesda Kota Yogyakarta selama ini yakni berkisar Rp 20 miliar sampai Rp 25 miliar.

"Otomatis anggaran yang dulu untuk Jamkesda dibayarkan untuk premi BPJS Kesehatan. Secara anggaran, pagu yang dulu untuk Jamkesda cukup," paparnya.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005